

Rp 31,9 Miliar untuk Tangani Masalah Sampah

BANDUNG, (PR).-

Sebanyak 3.194 kit Kang Empos (pengolahan sampah organik dengan karung, ember, dan kompos) dibagikan kepada 20% keluarga di setiap kelurahan.

Pemerintah Kota Bandung berharap, pembagian kit ke sejumlah keluarga itu dapat mengolah sampai 200 ton sampah organik per hari.

Pemkot Bandung membagikan kit Kang Empos kepada para ketua RW di Kota Bandung di GOR C-Tra Arena, Kamis (30/11/2023).

Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna menghadiri pembagian kit sekaligus sosialisasi Kang Empos tersebut.

Ema mengatakan, Pemkot

Bandung mengalokasikan anggaran Rp 31,9 miliar untuk kit Kang Empos bagi 20% keluarga per kelurahan dan penyediaan sarana dan prasarana maggotisasi pada setiap kelurahan.

"Kami memberikan dukungan sarana, prasarana, pengutan sumber daya manusia (Kang Empos dan maggotisasi di tiap-tiap kelurahan) untuk mengolah sampah organik dari sumber," ucap Ema, seperti dilaporkan kontributor "PR" **Satira Yudatama**.

Pemkot Bandung pun tengah melakukan langkah-langkah penanganan sampah. Beberapa di antaranya Kang Empos, membangun tempat pengolahan sampah terpadu di Gedebage, pengadaan hanggar-hanggar maggotisasi, penambahan

mesin pencacah dan pemilah di beberapa TPS. Saat langkah-langkah itu berjalan sesuai harapan, Ema mengatakan, idealnya sekitar 550 ton sampah terolah per hari.

"Itu belum termasuk hasil penerapan kawasan bebas sampah yang terus berjalan, mengurangi 300 ton sampah yang diangkut ke TPS per hari," ujarnya.

Ema mengajak masyarakat agar bersama-sama mengolah sampah semenjak dari sumber. Dengan kebersamaan dan kolaborasi seluruh elemen, pihaknya optimistis Kota Bandung dapat keluar dari kedaruratan sampah.

"Sosialisasi dan edukasi terus berjalan. Mari semua menjadi pejuang untuk menyelamatkan kota dari sampah. Perihal Kang Empos, beriringan dengan pemberi-



SATIRA YUDATAMA/KONTRIBUTOR "PR"

*KETUA DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan menyerahkan kit Kang Empos kepada warga saat sosialisasi dan pembagian Kang Empos di GOR C-Tra Arena, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023). **

an kit, ada edukasi ihwal pemanfaatannya dari pakar kebersihan, Pak Gun Gun Sap-

tari. Pak Gun Gun juga yang memprakarsai Kang Empos," tuturnya. ***

Ema: Selamatkan Kota dari Kedaruratan Sampah!

BANDUNG, (KG).-

Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran di APBD perubahan sebesar Rp31,9 miliar untuk pemberian daya dukung pengelolaan sampah organik dengan metoda Kang Empos (karung, ember dan pengomposan) serta pembuatan hanggar maggotisasi. Sosialisasi sekaligus pemberian sarana pun dilakukan Pemkot Bandung pada Kamis (30/11).

Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, para RW diedukasi langsung oleh pakar pengelolaan sampah Gun Gun Saptari. Mereka pun diberikan sarana sehingga diharapkan para RW menjadi pionir dan teladan sehingga dicontoh oleh masyarakat.

"Kang Empos ini diberikan pada 20 persen masyarakat di kelurahan dan hampir 90 persen barang tersebut telah diterima oleh masyarakat," ungkap Ema.

Ema mengajak masyarakat

kat untuk bersama-sama mengolah sampah mulai dari sumber. Dengan kebersamaan dan kolaborasi seluruh pihak ia optimis Kota Bandung dapat keluar dari kedaruratan sampah.

"Karena sosialisasi dan edukasi sudah berjalan. Mari semua menjadi pejuang menyelamatkan kota dari sampah," katanya.

Selain itu, ungkap Ema, Pemkot Bandung pun membangun 151 hanggar maggot. Di mana satu hanggar di satu kelurahan. Sejumlah warga pun sudah dilatih untuk mengelola maggot tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dudy Prayudi mengatakan, jumlah total Kang Empos yang akan diberikan adalah 3.194 buah. Dengan estimasi pengolahan sampah organik yang dapat diolah sebesar 5 ton per hari.

Kang Empos ini juga akan diberikan kepada 20 persen penduduk per kelurahan.

Jika ini sudah berjalan,

Dudy menyebut metode ini dapat mengurangi sampah secara signifikan sampai 200 ton.

"Belum lagi ditambah dengan Kang Empos yang dibagikan ke 20 persen dari jumlah KK yang kalau ini secara masif dilakukan maka akan mengurangi sampah organik sekitar 200-an ton. Ini sangat signifikan untuk membantu Pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi sampahnya yang 50 persen tidak bisa dibuang ke TPA Sarimukti," ujarnya.

Selain itu, ada pula hanggar maggot di 151 Kelurahan yang ditargetkan dapat mengelola sampah organik mencapai 151 ton per hari.

"Kalau semuanya bisa berjalan bisa mengurangi sampah sangat banyak. Mudah-mudahan dengan upaya kita untuk menghadirkan dan memperbanyak di rumah-rumah tangga ini bisa mengurangi sampah organik yang ada di Kota Bandung. (Yeni Siti Apriani)**

RAPAT PARIPURNA
KE-15
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG KE-V 2023-2024
Dalam Rangka
Setapan Propemperda Tahun 2024;
Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang APBD T.A 2024.
Bandung, 29 November 2023



PENJABAT Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono (kiri) dan Ketua DPRD Kota Bandung, Teddy Rusmawan (tengah) mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (29/11).

APBD Kota Bandung Alami Defisit

BANDUNG, (KG).-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 telah disetujui dan diputuskan oleh DPRD Kota Bandung pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (29/11).

Untuk struktur APBD Kota Bandung tahun 2024 yakni anggaran pendapatan Rp7,38 triliun, anggaran belanja Rp7,78 triliun, dan pembiayaan dialokasikan Rp397,29 miliar.

Melihat struktur yang ada, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku APBD 2024 mengalami defisit. Dalam bahasa anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan atau pembiayaan netto. Ini sebagai nilai penyeimbang antara perencanaan pendapatan dan kebutuhan belanja.

"Anggaran pendapatan Rp7,38 triliun dan belanja Rp7,78 triliun artinya ada Rp397 miliar penerimaan pembiayaan atau defisit. Dan itu sudah menjadi kesepakatan antara penyelenggara pemerintahan daerah, dalam hal ini Pemkot Bandung dengan DPRD Kota Bandung," ujar Ema, Kamis (30/11).

Dikatakannya, defisit merupakan hal yang bisa terjadi

dalam sebuah struktur anggaran. Dalam proses perjalanan anggaran, defisit ini biasanya tertutup dari dana kurang salur dari pemerintah pusat, atau bantuan keuangan dari Pemprov Jabar atau juga ada efisiensi didalam eksekusi penggunaan anggaran.

"Selalu ada (bantuan keuangan, **red**). Dari provinsi itu bantuan-bantuan keuangan yang dibayar di belakang itu selalu ada. Ada kurang salur dari pusat, DAK (dana alokasi khusus) atau DAU (dana alokasi umum) itu biasanya ada," jelasnya.

Ema mengatakan, setiap tahun Kota Bandung tidak pernah kekurangan anggaran di kas. Sehingga di Kota Bandung tidak ada istilah gagal bayar. "Kita tidak ada pinjaman dari bank," ujarnya.

Lebih lanjut, Ema mengatakan, dibandingkan dengan tahun kemarin, defisit pada APBD 2024 lebih sedikit berkurang. Biasanya menuju

APBD Perubahan selalu ada gambaran, sehingga defisit bisa tertutup.

"Sekarang kan anggaran dievaluasi oleh gubernur. Mungkin saja hasil evaluasi gubernur itu tiba-tiba ada dana yang harus diterima oleh Kota Bandung, nah itu nanti sudah tidak dibahas lagi dengan Banggar. Tapi itu bagian yang akan kita laporkan dalam realisasi anggaran," ungkapnya.

Ditegaskannya, defisit selalu ada karena pendekatan dalam membuat anggaran menggunakan paradigma belanja, bukan paradigma pendapatan. "Makanya, harus pakai paradigma pendapatan dulu, baru kita berbicara kebutuhan belanja. Bukan kita mengedepankan dulu belanja, kemudian disesuaikan dengan pendapatan. Itulah yang selalu jadi potensi defisit," ungkapnya.

Anggaran yang selalu dialokasikan yakni *mandatory spending*. Seperti pendidikan minimal 20 persen, dan realisasi di Kota Bandung sebesar 26 persen. Untuk kesehatan, sesuai undang-undang 10 persen dan realisasinya sudah 20 persen.

"Infrastruktur minimal 40 persen. Infrastruktur ini bukan hanya jalan, tapi infrastruktur secara keseluruhan.

Kemudian juga 'mandatory spending' itu kegiatan sosial, trantibum, perumahan dan pemukiman, dan urusan wajib dasar yang harus dipenuhi oleh semua level pemerintahan termasuk kota," ujarnya.

Pembangunan infrastruktur di antaranya pembangunan jalan, trotoar, penanganan banjir. Pembelian lahan parkir untuk RSUD Ujungberung sebesar Rp25 miliar, dan juga ada anggaran penanganan sampah.

Penanganan masalah sampah, ungkap Ema, menjadi salah satu atensi dalam penganggaran di APBD 2024. Nantinya di APBD ini akan ada alokasi untuk pembiayaan para petugas non ASN di kelurahan. Petugas ini berasal dari warga masyarakat yang sudah dilatih yang nantinya menjadi pengelola sampah organik dan anorganik.

"Setahu saya anggarannya hampir Rp10 miliar, sekitar Rp9 miliar lebih. Memang tidak persis Rp10 miliar, tapi mendekati Rp10 miliar sekitar Rp 9,6 miliar," ujarnya.

Anggaran yang dialokasikan ini dikoordinasikan oleh DLH dan kemudian didistribusikan ke kelurahan sesuai jumlah sumber daya manusia (SDM) warga yang jadi pelaksana pengelola sampah. (Yeni Siti Apriani)**

Pemkot Raih Penghargaan dari BI

BANDUNG, (KG).-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meraih tiga penghargaan sekaligus pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, yang digelar baru-baru ini.

Ketiga penghargaan tersebut antara lain Juara 1 Kategori Kota Dengan Digitalisasi Ekonomi Daerah Terbaik dalam Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) Jawa Barat tahun 2023, Terbaik III Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kategori Kota IHK Pinunjul Award Tahun 2023, dan Mitra Edukasi Cinta Bangsa Pahami Rupiah Terbaik Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 kepada Kecamatan Sumur Bandung.

Penghargaan diterima langsung oleh Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Ia menyambut positif penghargaan ini. Menurutnya, penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot Bandung untuk memberikan layanan terbaik.



BANDUNG.GO.ID

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung meraih tiga penghargaan sekaligus pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, belum lama ini.

"Alhamdulillah kita mendapat penghargaan di tiga kategori dari Bank Indonesia. Tentu, ini menjadi motivasi bagi kita untuk sama-sama meningkatkan pelayanan dan juga prestasi ya," ujar Bambang usai menerima penghargaan.

Sedangkan Asisten Pereko-

nomian dan Pembangunan Kota Bandung, Eric M. Attauriq menilai, prestasi ini adalah buah dari sinergisitas dan kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung dan stakeholder terkait.

"Ini berkat kolaborasi Bank Indonesia Jabar, Bulog Kota

Bandung, BMKG, serta akademisi dan praktisi," katanya.

Sementara itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Barat, Bambang Pramono dalam sambutannya menyebut, perekonomian Jawa Barat tetap tumbuh positif pada triwulan III 2023 sebesar 4,57% (yoy). Hal ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan realisasi investasi.

Ia mengungkapkan, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan investasi di Jawa Barat. Selain itu, Bambang juga optimis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2023.

Sebagai penutup, Bambang menyebut ada berbagai tantangan struktural yang berpotensi menjadi faktor penahan akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Antara lain meliputi kenaikan harga pangan, realisasi investasi, ekonomi syariah, dan penggunaan digitalisasi. **(Yeni Siti Apriani)****

Tertutupi Bantuan

Kota Bandung Defisit Rp 397,29 Miliar

BANDUNG, (PR).-

Pemkot dan DPRD Kota Bandung menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung tahun 2024.

Dari rencana pendapatan Rp 7,38 triliun, alokasi belanja mencapai Rp 7,78 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit pembiayaan sekitar Rp 397,29 miliar.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menuturkan, defisit penerimaan pembiayaan dalam istilah struktur anggaran merupakan hal lumrah. Hal itu mengingat, pendekatan paradigmanya pada kebutuhan, bukan pendapatan.

"Idealnya, pendekatan paradigmanya pada pendapatan," ucap Ema di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukan-cana, seperti dilaporkan kontributor "PR", **Satira Yudatama**, Kamis (30/11/2023).

Menurut Ema, defisit pada

struktur APBD Kota Bandung bukan kali pertama. Seingatnya, defisit pada APBD 2024 lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Biasanya, defisit tertutup pada tahun berjalan. Dia memastikan, Pemkot Bandung tak meminjam ke bank untuk menutupi defisit tersebut.

Sejauh ini, selalu ada bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang penyalurannya belakangan. Belum lagi kurang salur dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat.

Selain itu, selalu ada dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang juga dari pemerintah pusat. "Hanya, kami tak bisa memastikan berapa, mengingat penghitungannya dari level pemerintahan masing-masing. Terdapat pula sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari tahun anggaran sebelumnya," tutur Ema.

Ema mengatakan, Pemkot

Bandung belum pernah mengalami kondisi gagal bayar. DBHCHT, DAK, dan DAU dari pemerintah pusat, tergambar sebelum APBD perubahan tahun berjalan.

Ema pun mengingatkan kepada jajarannya agar melaksanakan APBD tangkas, menghindari sikap menunda-nunda, terutama dalam pengadaan infrastruktur fisik dengan anggaran besar.

Naikkan NJOP

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengesahkan RAPBD tahun 2024 sebesar Rp 3,2 triliun. Penetapannya menjadi pendorong bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan potensi pendapatan daerah.

"Harus bekerja maksimal karena ini hanya target-target saja. Minimal, kalau perlu lebih dari ini. NJOP (nilai jual objek pajak) dan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) dinaik-

kan, sehingga potensi penerimaan pajak daerah bisa segera terealisasi," ujar Penjabat Bupati Bandung Barat, Arsan Latif seusai sidang paripurna di Lembang, sebagaimana dilaporkan kontributor "PR" **Dewiyatini**, Kamis (30/11/2023).

Menurut Arsan, pihaknya berani menaikkan APBD dari sebelumnya dikarenakan adanya pertimbangan potensi dan perkembangan ekonomi. "Bukan sekadar menetapkan angka-angka saja sehingga naik dari tahun sebelumnya," katanya.

Menurut Arsan, pihaknya berwenang menaikkan NJOP, paling tidak mendekati harga pasar. Terakhir, NJOP dinaikkan pada 2019.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bandung Barat, Duddy Prabowo mengatakan, kenaikan NJOP ini akan diikuti kenaikan pajak BPHTB. Ia meyakini pihaknya mampu memenuhi target.***

Yana Siapkan Pleidoi Setelah Dituntut 5 Tahun Penjara

BANDUNG, TRIBUN

Mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bakal menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi, atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntutnya hukuman 5 tahun penjara.

Dorel Almir SH, kuasa hukum Yana Mulyana mengatakan, pembelaan akan disampaikan pekan depan, adapun isi dari pleidoi nantinya bakal menguraikan fakta-fakta persidangan.

"Menurut kita, tentu bukan seperti yang dituntut oleh JPU, dan memang berdasarkan fakta persidangan tingkat kesalahan dan perolehan dari Pak Yana itu paling terkecil," ujar Dorel,

Kamis (30/11).

Dalam amar tuntutan Jaksa, Yana Mulyana dijerat pasal 12 huruf a, pasal 12 b Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam pasal tersebut, terdapat unsur menggerakkan yang dilakukan Yana sebagai kepala daerah, sehingga tuntutan yang diberikan kepada Yana lebih tinggi ketimbang dua anak buahnya

yakni Kepala Dinas Perhubungan Dadang Darmawan 4,6 tahun dan Sekretaris Dinas Perhubungan Khairur Rijal 4 tahun penjara.

Dorel berpendapat bahwa faktanya sebagai wali kota saat itu, Yana Mulyana tidak memiliki kebijakan untuk menggerakkan atau menentukan spesifikasi dan teknis dalam proyek pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP).

"Anggapan dari pihak pemberi ada hubungan dengan jabatan. Bahwasannya Pak Yana bisa apa enggak, itu soal lain. Tapi faktanya Pak Yana nggak mungkin bisa menentukan, dan dalam persidangan juga tidak

ada memerintahkan dalam menentukan pemenang," katanya.

"Pak Yana juga secara jujur mengakui penerimaan itu ada waktu ke Thailand. Oleh karenanya penerimaan itu sifatnya kelalaian atau patut diduga," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Yana Mulyana, lima tahun penjara. Mantan Wali Kota Bandung itu dinilai bersalah melakukan korupsi dalam proyek pengadaan CCTV dan internet service provider (ISP) tahun anggaran 2022-2023. (nazmi abdurrahman)

Ruang Publik Harus Ramah Disabilitas

BANDUNG, (KG).-

Pemkot Bandung bersama Komunitas Dilans Indonesia masifkan inklusi di Kota Bandung, dengan melakukan kajian bersama di Arto-tel Braga, Sabtu (2/12). Hal ini sebagai upaya dalam memenuhi perlindungan dan hak penyandang disabilitas serta lansia,

Menurut Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, Pemkot Bandung terus berupaya untuk menciptakan Kota Bandung yang ramah bagi disabilitas dan lansia. Terlebih kebijakan ramah disabilitas di Kota Bandung telah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2019, Perwal Nomor 120 Tahun 2022, dan Perwal Nomor 1439 Tahun 2018.

"Kota inklusi akan terus kita gaungkan agar hak dan perlindungan masyarakat disabilitas dan lansia bisa terus terpenuhi secara berkala," ucap Bambang.

Pemkot Bandung, kata Bambang, membuat aturan agar pendidikan inklusif menerima penyandang disabilitas maksimal 5 persen dari kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB). Begitu pun dengan rekrutmen ASN, di mana minimal 2 persen formasi untuk disabilitas.

Tak sekadar itu, lanjutnya, Pemkot Bandung juga berupaya untuk menyediakan fasilitas yang ramah lansia dan disabilitas pada ruang-ruang publik. Salah satunya di



DARMA LEGI/KORAN GALA

WARGA melintas di jalur trotoar (jalan) bagi disabilitas di Jln. Ahmad Yani, Kota Bandung, Rabu (1/3). Fasilitas umum dan sarana transportasi bagi penyandang disabilitas khususnya penggunaan kursi roda di Kota Bandung dinilai masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas.

RSUD Bandung Kiwari melalui layanan Laraspurwa.

"Termasuk di rumah ibadah dan trotoar secara berkala pun kita buat agar ramah disabilitas dan lansia," lanjutnya.

Presiden Dilans Indonesia, Farhan Helmy menuturkan, fasilitas yang telah dipenuhi selama ini bagi para disabilitas dan lansia bisa dinikmati serta dirayakan. "Bukan hanya sekadar dirayakan, kita di sini berjuang bersama-sama. Kita di Dilans sudah hampir 2 tahun berjuang untuk para

disabilitas dan lansia di seluruh Indonesia termasuk Kota Bandung," tutur Farhan.

Dikatakannya, berbagai kegiatan digelar dalam rangka hari jadi Dilans. Kegiatan dilaksanakan selama 10 hari dan puncaknya pada 10 Desember 2023.

Kegiatan yang digelar beragam seperti Yoga for Dilans, dialog interaktif, pameran, pemutaran film, kuliah umum, pertunjukan musik, kerja sama MoU dengan berbagai komunitas, dan penyerahan simbolik kursi roda elektrik pada

relawan Dilans," paparnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut dibuat untuk menunjukkan jika disabilitas dan lansia bukan berarti akhir dari segalanya. Sampai saat ini, sudah ada 500 orang aktivis Dilans Kota Bandung yang ikut berperan membantu para disabilitas dan lansia.

"Ini adalah proses yang harus kita perjuangkan sama-sama, bukan mimpi yang instan. Ada teman netra usia 20 tahun mahasiswa yang bisa membaca peta berkat dibantu oleh aktivis dari Dilans," akunya.

Farhan mengaku akan terus mencari cara untuk bisa mengakses fasilitas bagi disabilitas. Terutama dalam hal pemberdayaan, menjadi penting bagi para disabilitas dan lansia.

Tahun ini, Dilans telah mengampanyakan pemenuhan hak disabilitas dan lansia sejak Juni. Bukan hanya di Indonesia, Dilans juga berkolaborasi dengan mitra internasional untuk menyampaikan pesan tersebut.

"Di luar negeri kira kerja sama dengan komunitas pemanjat. Di Indonesia, ada 7 dialog interaktif. Khusus Kota Bandung, kita ingin jadikan Sumur Bandung sebagai contoh konkret inklusi. Misalnya, kafe di sekitar Braga menyediakan bahasa isyarat dan fasilitasnya mudah diakses teman-teman disabilitas," lanjutnya. **(Yeni Siti Apriani)****

Tidak Ada Kasus Baru di 2030

Pemkot Bandung Terus Tekan Penularan HIV/AIDS

BANDUNG, (KG).-

Pemkot Bandung memasang target tidak ada lagi kasus baru HIV/AIDS di tahun 2030. Upaya pun terus dilakukan Pemkot Bandung untuk menekan penyebaran dan penularan penyakit akibat virus mematikan ini.

Salah satu strategi yang dilakukan yakni pelacakan cepat agar penyintas HIV/AIDS bisa diketahui dan segera diobati permanen. Hal tersebut terungkap dalam peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2023 di Gelanggang Generasi Muda (GGM), Jalan Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (2/12).

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 tingkat Kota Bandung mengusung tema 'Eksplorasi Budaya dalam Mewujudkan Bandung Unggul Tanpa Stigma'.

Diharapkan, pada tahun 2030 tidak ada lagi kasus HIV/AIDS baru di Kota Bandung. Begitu pun dengan stigma bagi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), diharapkan saat ini sudah tidak ada lagi.

"Tanpa ada stigma bagi ODHA. Tema ini mengajak masyarakat ber-

partisipasi aktif dalam mencegah penularan HIV/AIDS," ucap Sony.

Beragam kreasi warga yang hidup bersama HIV/AIDS ditampilkan di peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 tingkat Kota Bandung. Mulai dari lukisan lewat pameran seni di area GGM. Lalu ada musikalisasi puisi, dan sesi berbagi kisah bertahan hidup bersama HIV/AIDS.

Kegiatan ini menunjukkan dukungan bagi mereka yang hidup bersama HIV/AIDS. "Kegiatan ini juga merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kemandirian ODHA di Kota Bandung," katanya menambahkan.

Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Maya Verasandi mengatakan, salah satu target yang dikejar Kota Bandung ialah tidak ada lagi kasus baru HIV/AIDS pada 2030.

Selain itu, diharapkan pula Kota

Bandung tumbuh menjadi kota yang unggul dan nol HIV/AIDS. Serta menjadi kota tanpa stigma bagi ODHA.

"Kami berharap pada 2030 tidak ada lagi infeksi HIV baru. Selain itu tidak ada lagi stigma, dan tidak ada lagi kematian karena HIV/AIDS," tuturnya.

Tertinggi

Sebelumnya diberitakan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan Kota Bandung menjadi daerah dengan jumlah kasus positif HIV/AIDS terbanyak di sepanjang periode Januari-September 2023.

Pengelola Program HIV Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Asep Rubyani menuturkan, secara keseluruhan, total jumlah positif HIV di Jawa Barat kini berada di angka 7.383. Jumlah orang dengan HIV tersebut mayoritas didominasi oleh usia produktif dan remaja. "Masih sesuai dengan temuannya di Kota Bandung (positif HIV) ada 747, Kota Bekasi 689, Kabupaten Bekasi 662," ungkap Asep, Rabu (15/11) lalu.

Adapun untuk kasus AIDS, di Jawa Barat totalnya mencapai 1.617 dengan daerah terbanyak masih ditempati kota/kabupaten besar di Jabar seperti Kota Bandung sebanyak 190 jiwa, Kabupaten Bogor 139 orang, Ka-

bupaten Indramayu 135, dan Kabupaten Majalengka sebanyak 116 jiwa. "Untuk jenis kelaminnya itu 22 persen wanita dan 78 persen laki-laki. Untuk kelompok umurnya lebih banyak di usia 40 - 49 tahun dan usia produktif," katanya.

Diakui Asep, secara nasional trend peningkatan kasus HIV/AIDS kini bukan didominasi oleh penyalahgunaan narkoba melainkan karena seks sesama jenis dengan angka hampir 200%. "Jadi sekarang lagi trend secara nasional peningkatan kasus (HIV/AIDS) di kalangan LSL atau laki seks laki, itu peningkatannya 200 persen. Jadi sekarang itu sedang trend," katanya.

Untuk mencegah bertambahnya jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah melakukan langkah antisipasi terhadap populasi kunci, tidak hanya kepada wanita PSK (Pekerja Seksual) saja, tapi juga bersama ibu hamil. "Untuk antisipasi itu kita kepada populasi kunci dalam hal ini seperti wanita PSK, warga binaan dan ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu sebelum lahir kita tes dulu," ujarnya. (Yeni Siti Apriani/Ferdy Soegiyo Putra)**

Maksimalkan Potensi Pasar Tradisional

BANDUNG, (KG).-

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan Perumda Pasar harus dapat memaksimalkan peluang dan potensi 37 pasar tradisional yang ada di Kota Bandung.

Hal tersebut diungkapkannya saat menghadiri Hari Jadi ke-16 Perumda Pasar Juara Kota Bandung di Pasar Sarijadi, Senin (4/12).

"Tentunya kami dari Pemerintah Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Perumda Pasar Juara. Semoga dengan usia yang semakin dewasa meningkatkan kinerja Perumda Pasar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat di dunia perpasaran dan juga masyarakat lainnya," katanya.

Menurutnya, berbagai tantangan tentunya akan dihadapi dalam peningkatan kualitas pasar menjadi perhatian bersama. Untuk itu, ia meminta Perumda Pasar Juara untuk terus melakukan perbaikan diberbagai aspek.

"Persoalan pasar masih sangat banyak yang harus diselesaikan. Kuncinya lakukan rekomitmen dimanfaatkan untuk evaluasi bagaimana kondisi kita saat ini dan Perumda Pasar harus lebih baik,"

ujarnya

Di umurnya yang ke-16, Ema mengharapkam Perumda Pasar Juara dapat menghadirkan kualitas pasar-pasar di Kota Bandung sebagai pasar juara dari berbagai aspek.

"Saya harap Perumda Pasar mampu mengelola aset pasar yang maksimal sehingga menghadirkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di momentum hari jadi ini semoga menjadi momen yang terbaik," kata Ema.

Sementara itu, Plt Dirut Perumda Pasar Juara, Ricki Ferlino Safri Djohan berharap, pada momentum hari jadi ke-16, Perumda Pasar dapat terus bersaing dengan kemajuan zaman dan memberikan kontribusi terbaik bagi Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat.

Kontribusi itu, lanjut Ricki, berupa pemberian pelayanan terbaik pada masyarakat baik dari sisi memberikan tempat lapak jualan kepada para pedagang juga kemudahan akses terhadap pembelian barang-barang kebutuhan pasar sehari-hari.

"Kami berharap dukungan serta doa dari seluruh masyarakat memudahkan Perumda Pasar dapat menjadi pelayanan yang maksimal bagi masyarakat," ujarnya. **(Yeni Siti Apriani)****

BANDUNG

Masalah Ekonomi Tidak Bisa Ditangani Satu Pihak

KEPALA Bidang Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi dan Pembinaan Bappelitbang Kota Bandung Taufiq mengatakan kolaborasi dalam membangun perekonomian kota harus didukung secara pentahelix.

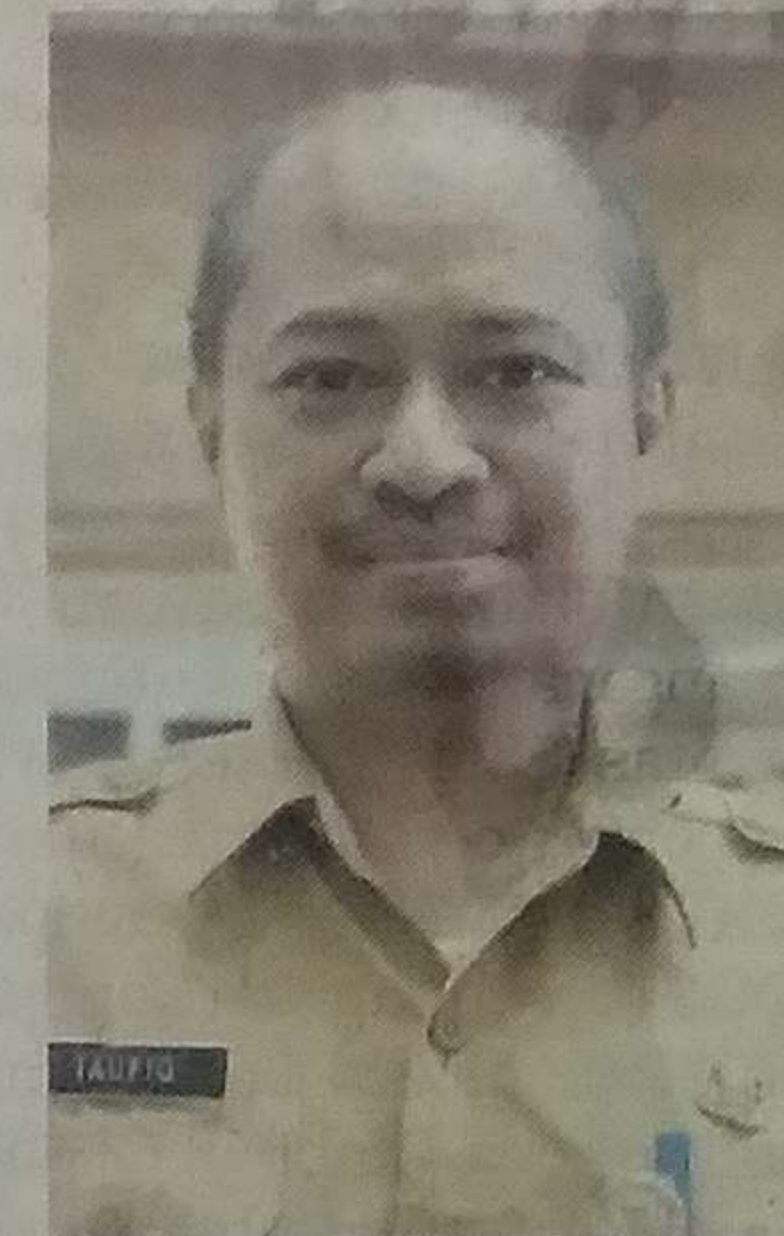
"Secara sumber finansial Kota Bandung memiliki keterbatasan. Adanya optimalisasi dan kerjasama dari berbagai unsur diharapkan dapat meningkatkan akselerasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung," ujar Taufiq saat ditemui Tribun Jabar, di Jalan Pelajar Pejuang, Senin (4/12).

Menurut Taufik, permasalahan ekonomi yang terjadi di Kota Bandung tidak bisa diselesaikan

oleh satu pihak. "Permasalahan hingga hari ini di antaranya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan kota. "Isu yang akan dihadapi di tahun 2024 ada di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung," kata Taufik.

"Tidak mungkin kemiskinan hingga pengangguran ditekan sampai nol persen, upaya kami meminimalisasi terkait kondisi-kondisi yang menjadi dampak negatif dari pembangunan," katanya. **(nappisah)**



TRIBUN JABAR/NAPPISAH

TAUFIQ

KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAN PEMBINAAN BAPPELITBANG
KOTA BANDUNG



Hadirkan Enam Mesin Gibrig

● Pengolahan Sampah di Gedebage Kota Bandung

BANDUNG, TRIBUN - Pemkot Bandung terus memperhatikan penanganan sampah yang masih berstatus darurat. Salah satu upayanya menghadirkan tempat pengolahan sampah terpadu, seperti di Gedebage dengan telah selesai memasang biopond yang merupakan tempat larva maggot.

Namun, untuk atapnya belum selesai semua, termasuk untuk atap mesin gibrig yang rencananya hadir empat unit, tetapi baru dua unit yang datang.

Sekda Kota Bandung sekaligus Ketua Harian Satgas Penanganan Sampah Kota Bandung, Ema Sumarna meminta untuk si-

multan dengan proses pendidikan masyarakatnya.

Pasalnya, kata Ema, akan ada 69 orang yang memiliki lahan pekerjaan baru untuk mengelola maggot, mengoperasikan mesin gibrig, dan memproses pencacahan.

"Mereka bakal dibayar per bulan. Jadi, dalam setahun kan luar biasa. Pasti untuk upahnya UMK yang menjadi pedoman. Idealnya seperti itu," ujar Ema, Minggu (3/12).

Mesin gibrig yang akan disediakan sebanyak enam unit, namun dua unit lagi sedang dalam proses datang sambil menunggu pemasangan atapnya. Ema meminta dalam tiga hari

ini atap sudah selesai.

"Kalau biopond semua sudah selesai tinggal untuk tanah dan lainnya itu yang harus segera disiapkan. Saya juga melihat ada tumpukan-tumpukan yang mungkin dilakukan pencampuran, ya mungkin yang lebih paham nanti oleh orang yang mengerti maggotisasi untuk mengoperasionalkannya," ujar Ema.

Adapun pelatihan masyarakatnya, telah dilakukan sejak Jumat lalu sampai Minggu supaya simultan antara sarana prasarana diselesaikan, dan pelatihannya simultan, sehingga target operasional bisa berjalan.

Ema pun menyampaikan terkait kondisi terkini persampahan di Kota Bandung yang masih berstatus darurat. Menurut Ema, hasil inventarisasi masih ada sekitar puluhan rias jalan yang diketahui dipakai tumpukan sampah.

"Saya masih melihat ada warga yang membuang sampah organik dan anorganik ke TPS. Itu yang saya sesalkan. Kita sudah berkomitmen semua tapi ada unsur yang mengabaikan. Sebenarnya paling indah itu kesadaran. Dan saya katakan, pembakaran (sampah) itu tak boleh karena mengganggu lingkungan," katanya. (handri prilatama)